



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PERMATA ARIYANTO NUGROHO**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM**
3. NHK : **840916**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.900.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/408 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/230 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 294.000.000**

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
3. MOBIL, NISSAN PATROL Tahun 1980, WARISAN Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 60.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 40.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 3.294.000.000**

III. HUTANG **Rp. 240.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 3.054.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.